

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Pulau Lombok

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Pulau Lombok



Sumber: [www.wisatautama.com](http://www.wisatautama.com)

#### 1. Letak Geografis Pulau Lombok

Pulau Lombok merupakan pulau yang terletak di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang dipisahkan oleh Selat Lombok di sebelah barat yang berbatasan dengan Pulau Bali dan Selat Alas di sebelah timur yang memisahkan Lombok dengan Sumbawa. Pulau Lombok memiliki luas mencapai 5.435 km<sup>2</sup> dengan Mataram sebagai kota utamanya. Pulau Lombok sendiri memiliki bentuk

yang agak membulat dengan semacam “ekor” di sisi barat daya yang memiliki panjang kurang lebih 70 km.

Secara Adimistratif Pulau Lombok merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dibagi menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota antara lain:

- Kota Mataram
- Kabupaten Lombok Barat
- Kabupaten Lombok Utara
- Kabupaten Lombok Tengah
- Kabupaten Lombok Timur

## **2. Topografi**

Kondisi topografi Pulau Lombok didominasi oleh gunung api Rinjani yang memiliki ketinggian mencapai 3726 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Gunung Rinjani sendiri tercatat meletus terakhir kali pada tahun 1994, kemudian pada tahun 1997 Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak yang terdapat di tengah-tengah gunung dilindungi oleh pemerintah. Di daerah selatan Pulau Lombok merupakan daerah subur yang merupakan pusat pertanian berbagai macam komoditas seperti jagung, padi, kopi, tembakau, dan kapas.

## **3. Demografi**

Jumlah penduduk di Pulau Lombok tahun 2018 yaitu 3.352.988 jiwa yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Berikut tabel jumlah penduduk Pulau Lombok menurut jenis kelamin yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

**Tabel 2. 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Pulau Lombok Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kota Mataram	218.068	222.996	441.064
2	Kabupaten Lombok Barat	315.094	329.492	644.586
3	Kabupaten Lombok Utara	103.490	106.643	210.133
4	Kabupaten Lombok Tengah	427.134	476.298	903.432
5	Kabupaten Lombok Timur	537.152	616.621	1.153.773
	Jumlah keseluruhan	1.600.938	1.752.050	3.352.988

**Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018**

#### **4. Pariwisata**

Pulau Lombok memiliki banyak pilihan destinasi wisata yang tidak kalah indah dibandingkan dengan daerah pariwisata lainnya. Pariwisata Lombok mulai dikenal luas oleh wisatawan lokal dan mancanegara pada akhir dasawarsa 1990an, namun krisis moneter yang terjadi di Indonesia juga ikut berdampak pada industri pariwisata di Lombok. Kemudian pada tahun 1999 industri pariwisata di Lombok kembali menunjukkan geliat untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional. Pada tahun 2007 sektor pariwisata merupakan satu-satunya sektor yang berkembang di Pulau Lombok. Lombok sendiri memiliki beberapa destinasi wisata unggulan yang menjadi primadona bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang terbagi menjadi 3 objek destinasi antara lain:

1) Destinasi wisata alam:

- Pantai Senggigi
- Gili Air
- Gili Meno
- Gili Terawangan
- Gunung Rinjani
- Pantai Kute Mandalike
- Sembalun
- Tete batu
- Air terjun Sendang Gile
- Hutan Monyet Pusuk
- Pantai Selong Belanak
- Pantai Pink
- Pantai Aan
- Gili Kondo
- Pantai Tanjung Ringgit

2) Destinasi wisata budaya:

- Desa Adat Sade
- Desa Banyumulek
- Desa Sukarara
- Pura Lingsar
- Pura Suranadi
- Taman Narmada

- Taman Mayure
- 3) Destinasi wisata halal
- Islamic Centre
  - Masjid Kuno Rembitan
  - Masjid Kuno Bayan
  - Masjid Kuno Bilok Petung
  - Sejarah Nahdlatul Wathan (NW)

#### **B. Wisata Halal NTB**

Pariwisata halal merupakan salah satu jenis industri pariwisata baru yang menjadikan wisatawan muslim sebagai targetnya. Pariwisata halal juga memiliki perbedaan dibanding pariwisata konvensional dimana pariwisata halal menjadikan aturan-aturan Islam sebagai pedoman dalam pelayanannya. Salah satu pelayanan dari pariwisata halal adalah tidak diperbolehkannya hotel dan restoran untuk menyediakan makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan bahan haram lainnya. Selain itu juga dalam wisata halal fasilitas kolam renang dan spa yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Transportasi dalam industri pariwisata halal juga diwajibkan menggunakan konsep Islami. Penyedia jasa transportasi pariwisata halal diharuskan memberi kemudahan bagi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah selama perjalanan dengan menunjukkan tempat ibadah terdekat dan memberi tahu jika waktu shalat telah tiba. Sampai tahun 2018, pertumbuhan industri pariwisata halal mengalami signifikansi pertumbuhan terbesar jika dibandingkan dengan model pariwisata lain.

Menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI) diakses melalui <http://gmti.crescentrating.com>, diakses 30 Agustus 2019 pada 23:37 WIB, yang dipublikasikan pada bulan April 2018. Dalam data yang dipublikasikan GMTI tersebut pada tahun 2018 jumlah wisatawan muslim meningkat 10% dari tahun 2017 dari 131 juta jiwa menjadi 140 juta jiwa.

Sejak menerima penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik pada tahun 2015 dan 2016, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Pulau Lombok pun mengalami kemajuan yang pesat di sektor pariwisata halal. Berdasarkan analisis SWOT yang bersumber dari *Standing Committee of Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation* (COMCEC) yang dikutip melalui Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB menyebutkan bahwa kekuatan dalam pelaksanaan wisata halal di Indonesia lebih besar dari kelemahannya.

Dalam laporan tersebut dijelaskan beberapa kekuatan Indonesia dalam industri wisata halal antara lain memiliki pengalaman dalam menyediakan tempat ibadah sholat di area publik, atraksi yang disediakan untuk wisatawan juga banyak tersedia di Indonesia. Selain itu juga Indonesia banyak memiliki hotel syariah dan tempat wisata syariah yang “valuable for money”.

Dengan begitu, Indonesia khususnya NTB saat ini tengah gencar dalam melakukan branding dan promosi pariwisata halal. Dukungan dari media untuk meningkatkan promosi wisata halal juga harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga informasi wisata halal bisa sampai ke masyarakat dan wisatawan muslim. Pengemasan dan pengembangan pariwisata halal juga harus

dilakukan dengan sebaik dan semenarik mungkin agar memiliki kesan dan nilai tambah dimata wisatawan.

Dengan potensi wisata halal yang sangat besar yang dimiliki oleh Provinsi NTB, menjadikan Provinsi NTB menjadi salah satu role model wisata halal di Indonesia. Pengembangan dan promosi wisata halal di NTB pun terus dilakukan melalui upaya-upaya seperti dikeluarkannya Peraturan Daerah No.2 tahun 2015 serta Peraturan Gubernur No.15 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

### **C. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, seni dan budaya serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

#### **1. Visi, Misi dan Renstra**

##### **a. Visi**

“Terwujudnya Nusa Tenggara Barat Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesia Yang Berbudaya”.

##### **b. Misi**

1) Mengembangkan budaya dan kearifan lokal;

- 2) Mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan;
- 3) Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis dan bertanggung jawab; dan
- 4) Mengembangkan kemitraan pariwisata.

c. Rencana Strategis (RENSTRA)

- 1) Program dan kegiatan pokok bidang kebudayaan “penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya”

a) Program pengembangan nilai seni dan budaya Kegiatan pokok:

- Pembangunan karakter dan budi pekerti
- Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai tradisi
- Pengembangan masyarakat adat
- Pelestarian dan pengembangan kesenian
- Pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisional
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

b) Program kesejarahan dan kepurbakalaan Kegiatan pokok :

- Pengembangan nilai sejarah
- Pengembangan geografis sejarah
- Pengembangan pengelolaan peninggalan sejarah kepurbakalaan
- Pelestarian peninggalan warisan purbakala
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

- c) Program pengembangan sumber dayakebudayaan dan pariwisata Kegiatan pokok :
- Pembinaan SDM kebudayaan dan pariwisata
  - Penelitian dan pengembangan bidang pariwisata
  - Penelitian dan pengembalian bidang kepurbakalaan (Arkeologi)
  - Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
- 2) Program dan kegiatan pokok bidang pariwisata “peningkatan daya saing pariwisata”
- a) Program pengembangan destinasi pariwisata Kegiatan pokoknya :
- Pengembangan usaha industry dan investasi pariwisata
  - Pengembangan standarisasi pariwisata
  - Pengembangan daya tarik pariwisata
  - Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata
  - Peningkatan program PNPM mandiri dibidang pariwisata
  - Dukungan manajemen dari dinas terkait lainnya
- b) Program pengembangan pemasaran pariwisata Kegiatan pokoknya :
- Peningkatan promosi pariwisata dalam negeri
  - Peningkatan promosi pariwisata luar negeri
  - Peningkatan informasi pasar pariwisata
  - Peningkatan publikasi pariwisata

- Peningkatan perlanan promosi (pameran)
  - Pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata
  - Dukungan manajemen dan dukungan lainnya
- c) Program pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata Kegiatan pokok :
- Pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata
  - Pengembangan pendidikan tinggi pariwisata
  - Penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan
  - Dukungan manajemen dan teknis lainnya
- d) Program pengembangan kemitraan Kegiatan pokok :
- Pembinaan pelaku wisata

## **2. Tugas Pokok Dan Fungsi**

### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

### **b. Sekertaris**

#### **1. Tugas Pokok**

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan rencana kerja dan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

## 2. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja sekretariat dan rencana kerja Dinas
- b) Penyusunan konsep rencana strategis Dinas
- c) Penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata. Penyusunan konsep kebijakan dinas untuk pengelolaan program, keuangan, serta administrasi urusan umum dan kepegawaian.
- d) Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi program dan keuangan serta administrasi urusan umum dan kepegawaian dilingkup Dinas.
- e) Penyelenggaraan penilaian kinerja dilingkup Sekretaris.
- f) Pengkoordinasian tugas dan kegiatan dilingkup sekretaris.
- g) Pengkoordinasian tugas dan program sekretariat dengan bidang dilingkup Dinas.
- h) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan , dan evaluasi kegiatan sekretariat.
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas dan tugas dilingkup sekretariat secara rutin dan berkala
- j) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program dilingkup sekretariat secara rutin dan berkala Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan pengembangan bahasa, sastra dan kesenian, pelestarian nilai tradisional dan budaya daerah, serta pendalaman nilai sejarah dan perlindungan kepurbakalaan.

2. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang kebudayaan.
- b) Penyusunan konsep kebijakan pemerintah daerah dalam aspek pengembangan bahasa, sastra dan kesenian, pelestarian nilai tradisional dan budaya daerah, serta pendalaman nilai sejarah dan perlindungan kepurbakalaan.
- c) Pengorganisasian tugas dan program bidang dilingkup bidang kebudayaan.
- d) Penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai tradisional dan budaya daerah
- e) Pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan kesenian.
- f) Penyelenggaraan pendalaman nilai sejarah dan perlindungan kepurbakalaan.
- g) Pengkoordinasian tugas dan program kebudayaan dengan bidang lainnya dilingkup Dinas. Pengawasan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan program dilingkup bidang kebudayaan secara rutin dan berkala.

- h) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program dilingkup bidang kebudayaan secara rutin dan berkala.
- i) Pelaksanaan tugas dan lain yang diberikan atasan.

d. Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi pariwisata dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas.

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan pengembangan obyek daya tarik dan sarana.

2. Fungsi

- a) Penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek pembangunan obyek daya tarik dan sarana.
- b) Pengorganisasian tugas dan program bidang dilingkup bidang Destinasi Pariwisata
- c) Pembinaan dan pengembangan management obyek daya tarik dan sarana
- d) Penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan dan pembangunan obyek daya tarik dan sarana.
- e) Pengkoordinasian tugas dan program bidang Destinasi Pariwisata dengan bidang lainnya dilingkup Dinas

- f) Pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan program di lingkup bidang Destinasi Pariwisata secara rutin dan berkala.
  - g) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup bidang Destinasi Pariwisata secara rutin dan berkala.
  - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan pembinaan serta pemasaran dan pengembangan sumberdaya wisata.

2. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja pemasaran
- b) Penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek pembinaan serta pemasaran dan pengembangan sumber daya wisata.
- c) Pengorganisasian tugas dan program bidang di lingkup bidang pemasaran.
- d) Penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran dan pembangunan obyek daya wisata.
- e) Pengkoordinasian tugas dan program bidang pemasaran dengan bidang lainnya di lingkup Dinas.

- f) Pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan program dilingkup bidang Pemasaran secara rutin dan berkala.
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program dilingkup bidang pemasaran secara rutin dan berkala.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Sejarah dan Purbakala;
  - 2) Seksi Kesenian dan Perfilman dan;
  - 3) Seksi Lingkungan, Kebudayaan, dan Kepercayaan.
- d. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
  - 1) Seksi Produk Wisata;

- 2) Seksi Usaha Pariwisata, dan;
  - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
- 1) Seksi Promosi;
  - 2) Seksi Kerja Sama, dan;
  - 3) Seksi Analisa Pasar.

**Gambar 2. 2. Struktur Organisasi Dinas kebudayaan dan Pariwisata NTB**



Sumber: [www.disbudpar.ntbprov.go.id](http://www.disbudpar.ntbprov.go.id)